

BULETIN WAHANA KOMUNIKASI PROGRAM MFP II

SHARING SARENG

JARINGAN LSM BANDUNG



ADVOKASI ANGGARAN PEMDA UNTUK TATA KELOLA KEHUTANAN

Pengantar

Pada 23 September Tim MFP mendapat undangan dari FPPM Bandung untuk mensharing programnya. Khususnya yang terkait dengan program kerja FPPM dan jaringan LSM Bandung tentang advokasi anggaran pemda dan kaitannya dengan isu pengelolaan SDA. Hadir mewakili MFP : Diah Raharjo, Dedi Haryadi dan Rio R Bunet. Diskusi menjelang buka puasa ini dihadiridifasilitasi oleh Daan dan TJ dari Studio Drya Media.

Inisiatif pertemuan ini juga dalam rangka memfasilitasi pengembangan program MFP di regio Jawa Barat merupakan bagian dari pendekatan pro aktif untuk memfasilitasi pengembangan inisiatif.



“Kerja-kerja LSM/CSO ke depan diharapkan menyumbang dampak perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui advokasi kebijakan dan pemerintah daerah yang bersih dan berupaya pada peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan 10 hak dasar: pekerjaan, sandang, pangan, perumahan, kesehatan, lingkungan dan sumberdaya alam, sanitasi dan air bersih, tanah, rasa aman dan partisipasi”

Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) mengangkat isu partisipasi warga sebagai komponen penting demokratisasi dan reformasi pemerintah daerah. Diskusi menjelang buka puasa 23 September itu mengambil tema “Penguatan Kapasitas CSO untuk Pengembangan Partisipasi dalam Kebijakan dan Program Pengelolaan SDA dan Lingkungan di Daerah .

Tim MFP hadir dalam inisiatif ini untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama yang dapat dikolaborasikan antara LSM pegiat isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan LSM pegiat advokasi tatakelola kebijakan khususnya pemerintah daerah Jawa Barat.

Ria Djohani selaku tuan rumah diskusi membuka

diskusi dengan menyatakan bahwa FPPM sedang membangun suatu kerangka program penguatan daerah (kabupaten/kota). Platformnya adalah: pemda yang memenuhi hak-hak dasar warga. Dalam kaitan dengan itu Ria mengajak peserta mendiskusikan isu lingkungan dikaitkan dengan pembaruan daerah (local governance).

Diah Raharjo, Direktur MFP membuka diskusi dengan melontarkan bahwa LSM/CSO sering memisahkan isu sektor (termasuk PSDA) dengan isu tata pemerintahan karena beranggapan tidak ada keterkaitan antara isu sektor dengan penganggaran daerah, Hal itu juga karena pengaruh kebijakan lembaga dana yang mendanai kegiatan.



Suasana Diskusi Ngabuburit....



Diskusi yang dihadiri beberapa lembaga swadaya masyarakat Bandung seperti Studio Drya Media, Sanggar, Walhi Jabar, Akatiga dll berlangsung hangat. Walhi Jabar misalnya menggambarkan bahwa persoalan rehabilitasi lingkungan sebenarnya merupakan bagian dari pengalokasikan dana pembangunan oleh PEMDA, sehingga sebenarnya kegiatan konservasi PSDA dapat disinergikan. Dedy Haryadi Local Governance Faciliator MFP menambahkan Forum

SKPD Kehutanan di berbagai daerah belum berjalan. Selama ini Dinas Kehutanan bekerja sendiri saja. Belum ada aktivitas *budget group* terkait kehutanan (baik kabupaten/kota, propinsi, maupun nasional). Anggaran kehutanan dari sisi belanja: berapa, bagaimana alokasinya, dsb. belum diangkat. Begitu juga dari sisi *revenue* dari sektor kehutanan.

Beberapa catatan diskusi dirangkum sbb: (1) Kepentingan pengelolaan

SDA adalah mengelola sumber daya alam. (2) Perlunya mengawal proses penerimaan dan belanja yang diperoleh dari pengelolaan SDA. (3)Tapi di sisi lain ada kebijakan melindungi dari eksploitasi yang berlebihan, (4)Yang unik karena isu SDA ini lintas sektor, lintas administrasi dan lintas wilayah (5) Dilema soal keterbukaan informasi terkait sumber daya alam: apabila akses masyarakat terhadap informasi lemah, justru dimanfaatkan oleh *freerider*.

Skema Program Intervensi Kabupaten/Kota yang Respon dan Respek Terhadap Pemenuhan Hak-hak Dasar Warga

